MINI RISET

SOSIALISASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TERHADAP

KEPATUHAN PAJAK PENGUSAHA DI DESA KETANON

PPN DAN PPnBM

Dosen Pengampu: R. Gesah Mukti P., SE.Ak, MM

DI SUSUN OLEH KELOMPOK 10:

1. PRAYUGA KURNIAWAN (1960301100037)
2. SEPTIKA PUSPITASARI (1960301100032)
3. PUTRI ARIELLA BELINDA (1960301100007)

UNIVERSITAS TULUNGAGUNG

FAKULTAS EKONOMI

PRODI AKUNTANSI

Tahun Ajaran 2020/2021

Abstract

The purpose of this study was to find out how the socialization of land and building taxes could affect the amount of business tax payments in Ketanon Village. This research was conducted with a descriptive method. This research is a descriptive study using a phenomenological approach, the informants are determined using purposive sampling method. Data collection was carried out by interview and observation techniques. Data analysis used data search and conclusion. The results show that currently there are only a few entrepreneurs in Ketanon who pay land and building taxes. This is due to the imperfect way of conveying local government to Ketanon village entrepreneurs.

Key words: PBB, socialization, entrepreneur

Abstrak

Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana sosialisasi tentang pajak bumi dan bangunan bisa mempengaruhi jumlah pembayaran pajak pengusaha di Desa Ketanon. Penelitian ini dilakukan dengan metode diskriptif. Penelitian ini merupakan penelitian diskriptif dengan menggunakan pendekatan fenomenologis, informan ditentukan dengan menggunakan purposive sampling metode. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara dan observasi. Analisis data yang digunakan pencarian data dan penarikan kesimpulan. Hasil menunjukkan bahwa saat ini pengusaha di desa Ketanon masih sedikit yang membayar pajak bumi dan bangunan. Hal ini disebabkan karena kurang sempurnanya cara penyampaian pemerintah daerah kepada pengusaha desa Ketanon.

Kata kunci: PBB, sosialisasi, pengusaha

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkembangan perekonomian Indonesia pada saat ini bisa diukur dengan banyaknya bangunan yang berdiri baik di kota maupun di desa. Pembangunan ini terjadi karena meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Keberadaan bangunan tersebut merupakan salah satu indikator paling nyata perekonomian masyarakat di suatu wilayah. Salah satunya di Tulungagung dimana pembangunan tersebut terus terjadi setiap waktunya. Peningkatan tersebut saat ini menyebabkan pemerintah pusat dan daerah membuat regulasi khusus yang nantinya dapat mengontrol perkembangannya juga meningkatkan pendapatan negara.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Wajib Pajak yaitu pemegang atau pemilik usaha memiliki kewajiban membayar pajak juga mempunyai hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Seperti salah satu haknya adalah orang yang menjalankan sebuah bisnis seperti aktivitas jual-beli, termasuk produksi barang dan lain sebagainya. Yang mana, tujuan pengusaha yaitu memperoleh keuntungan dari aktivitas usaha jual-beli dan menanggung risiko bisnis yang dijalankan seperti gagal produksi, penurunan penjualan, hingga terparah mengalami gulung tikar.

Apabila diperhatikan dengan lebih seksama, selama ini perekonomian dalam negeri secara umum masih buruk, tetapi harus kita akui bahwa beberapa sektor usaha (terutama sektor swasta), masih menunjukkan kinerja yang cukup bagus. Usaha yang bisa dikatakan bertahan hidup dalam segala situasi dan kondisi tersebut kebanyakan adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Banyaknya usaha-usaha tersebut, baik yang berskala kecil maupun

menengah dengan sungguh-sungguh merupakan sumber pajak yang dapat dipergunakan untuk menambah pendapatan Negara. Salah satu faktor yang mendasari Negara berkembang memandang pentingnya keberadaan Usaha Mikro Rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya masih rendah apabila dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan usaha di tulungagung khususnya di desa Ketanon.

Tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang rendah juga salah satu pemacu pemerintah daerah melakukan pertimbangan yang matang dalam menentukan kebijakan fiskal yang diharapkan akan meningkatkan penerimaan daerah sekaligus kemudahan bagi wajib pajak serta mengurangi beban administrasi dari kedua belah pihak. Kemudahan melakukan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak dinilai dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Tentunya hal tersebut berbanding lurus dengan penerimaan yang akan diterima oleh daerah melalui sektor perpajakan.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Mekanisme pajak bumi dan bangunan bagi pengusaha ?
2. Apa faktor dan masalah pengusaha dalam membayar pajak ?
3. apa saran pengusaha terhadap kebijakan perpajakan ?

1.3 Tujuan

1. Mengetahui mekanisme pajak bumi dan bangunan bagi pengusaha
2. Mengetahui faktor dan masalah pengusaha dalam membayar pajak
3. Mengetahui saran pengusaha mengenai kebijakan perpajakan

BAB II

Landasan Teori

1. Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Teori kepatuhan (*compliance theory*) merupakan teori yang menjelaskan suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang diberikan. Menurut Tahar dan Rachman (2014) kepatuhan mengenai perpajakan merupakan tanggung jawab kepada Tuhan, bagi pemerintah dan rakyat sebagai wajib pajak untuk memenuhi semua kegiatan kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak merupakan perilaku yang didasarkan pada kesadaran seorang wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya dengan tetap berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. (Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 2008)

2. Theory Of Planned Behavior (TPB)

Teori ini digunakan untuk mempelajari perilaku manusia terutama terkait minat dan teori ini menyediakan suatu kerangka untuk mempelajari sikap terhadap perilaku (Pranadata, 2014:19). Menurut (Pranadata 2014) Munculnya minat perilaku ditentukan oleh dua faktor yaitu sikap terhadap perilaku (*behavior belief*) dan kontrol perilaku (*control belief*).

3. Pajak

pengertian pajak adalah Iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapatkan imbalan jasa (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pungutan pajak yang dilakukan pemerintah tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan keuangan pemerintah untuk belanja negara agar penyelenggaraan pemerintahan tetap berjalan. Dari pengertian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa sistem yang melekat pada pengertian pajak yaitu:

1. Pajak dipungut berdasarkan Undang- undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Sifatnya dapat dipaksakan.
3. Tidak ada kontraprestasi secara langsung oleh pemerintah.
4. Dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
5. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Berkaitan dengan hal tersebut berbagai jenis pajak yang dikenakan kepada masyarakat, beberapa diantaranya

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan jenis-jenis pajak sangat potensial dan strategis sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Pengelompokan Pajak Menurut Golongannya (Mardiasmo, 2003: 5).

a. Pajak Langsung

adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan. Contoh : Pajak Penghasilan (PPh).

b. Pajak Tidak Langsung

adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

3.1. Pengelompokan Pajak Menurut Sifatnya (Mardiasmo, 2003 : 5).

a. Pajak Subyektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subyeknya dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

b. b. Pajak Obyektif adalah pajak yang berpangkal pada obyeknya tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

3.2. Pengelompokan Pajak Menurut Pemungutannya (Mardiasmo, 2003 : 6).

a. Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh : PPh, PBB.

b. Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh : Pajak Reklame.

4. Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan. Menurut (Carolina,2009;7) pengetahuan perpajakan dapat di didefinisikan sebagai berikut; Pengetahuan mengenai wajib pajak mengetahui bahwa pajak merupakan iuran yang diwajibkan kepada masyarakat secara memaksa berdasarkan undang-undang perpajakan dan tanpa ada imbalan. Pengetahuan wajib pajak mengenai pemerintah (Direktorat jendral pajak) dalam upaya memberikan informasi dan pembinaan kepada masyarakat yang berhubungan dengan perpajakan, Pengetahuan wajib pajak mengenai fungsi NPWP Wajib pajak

mengetahui bahwa fungsi pajak adalah sumber penerimaan terbesar Negara. Dalam membayar pajak, apakah saudara tidak merasa keberatan?). 7.

4.1 Fungsi perpajakan

Menurut Resmi (2011:) pajak memiliki 2 fungsi yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regularend* (pengatur).

1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain.

2. Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan

5. Pengertian PBB-P2

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, disimpulkan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan adalah Pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan. Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besar pajak. Sedangkan menurut Diana dan Setiawati (2009) pengertian PBB adalah iuran yang dikenakan terhadap pemilik, pemegang kekuasaan, penyewa dan yang memperoleh manfaat dari bumi dan bangunan. Pengertian bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Menurut Direktorat Jenderal Pajak, Pajak Bumi Bangunan adalah Pajak Negara yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan.

5.1 Objek PBB-P2

Objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah Bumi dan/atau Bangunan. Bumi adalah Permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya, permukaan bumi meliputi tanah

dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa, tambak, perairan) serta laut wilayah Republik Indonesia. Sedangkan Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap padatanah dan/atau perairan (Mardiasmo, 2009).

5.2 Subjek PBB-P2

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 78, subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Sedangkan yang menjadi Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Orang Pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Jadi, hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan tersebutlah yang menjadi dasar untuk menentukan siapa subjek atas Pajak Bumi dan Bangunan.

5.3. Wajib pajak PBB-P2

Menurut Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan daerah. Wajib Pajak dapat berupa WPOP (Wajib Pajak Orang Pribadi) dan Wajib Pajak berupa Badan baik Luar Negeri maupun Dalam Negeri. (Indonesia 2009)

6. Pengertian Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi merupakan suatu upaya yang dilakukan Dirjen Pajak melalui berbagai metode untuk memberikan informasi terkait segala peraturan dan kegiatan yang berhubungan dengan perpajakan agar dapat dilaksanakan oleh masyarakat pada umumnya khususnya wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan usaha (Direktorat Jenderal Pajak, 2011).

Metode Sosialisasi Perpajakan

Program-program yang telah dilakukan berkaitan dengan kegiatan sosialisasi pajak yang dimaksudkan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak antara lain (Putra et al, 2014).

a) Mengadakan penyuluhan-penyuluhan tentang perpajakan.

- b) Mengadakan seminar-seminar di berbagai profesi serta pelatihan-pelatihan baik untuk pemerintah maupun swasta.
- c) Memasang spanduk yang bertemakan pajak.
- d) Memasang iklan layanan masyarakat di berbagai stasiun televisi.
- e) Mengadakan acara *tax goes to campus* yang diisi dengan berbagai acara yang menarik mulai dari debat pajak sampai dengan seminar pajak dimana hal tersebut bertujuan untuk menimbulkan pemahaman tentang pajak kepada masyarakat.
- f) Memberikan penghargaan terhadap wajib pajak patuh pada setiap Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

7. Pemahaman Wajib Pajak

Pemahaman wajib pajak sangat mempengaruhi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kurangnya pemahaman dan pengetahuan wajib pajak terhadap ketentuan Peraturan-Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan menyebabkan wajib pajak merasa tidak memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Melantri (2007) menjelaskan “proses pemahaman merupakan suatu proses belajar melalui pengamatan berusaha memahami segala jenis informasi yang berkaitan dengan pajak”. Pemahaman pajak juga dapat diartikan sebagai suatu proses perbuatan, atau cara yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengetahui, mengerti, dan memahami akan informasi pajak. Hal ini dapat berarti bahwa unsur pertanyaan /sampel tersebut diatas memiliki respon yang buruk dalam rangka pemenuhan kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Tulungagung yang harus segera dicari penyebabnya dan dilakukan upaya perbaikan terhadap hal tersebut. (Prabowo 2014)

8. Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Numantu (2003) ada dua kepatuhan yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Menurut Rahayu (2006:111) kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan dari : Kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri; Menghitung dengan benar pajak yang harus dibayar: Kepatuhan wajib

pajak dalam membayar pajak terutangnya dengan benar dan jujur (tidak memanipulasi pajak); Kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran tepat pada waktunya dan tidak pernah terlambat; Kepatuhan wajib pajak untuk terhindar dari hutang pajak; Kepatuhan wajib pajak untuk terhindar dari sanksi denda dan sanksi pidana dalam perpajakan.

9.Kewajiban Wajib Pajak

Kewajiban perpajakan adalah merupakan perwujudan dari pengabdian dan sarana peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional dengan tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaannya dipercayakan sepenuhnya kepada anggota masyarakat (Kustadi Arianta, 1984:4) terutama dalam mengkukuhkan sebagai PKP, memungut PPN dan PPnBM, melaporkan Pajak Penghasilan dan kewajiban mempunyai NPWP dan NPPKP. Kewajiban pengusaha Wajib Pajak menurut Mardiasmo (2009) dapat dilihat dari : a) kewajiban untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP); b) kewajiban memungut PPh dan PPnBM terutang; c) Kewajiban mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP, d)Kewajiban melaporkan pajak penghasilan, e) Kewajiban pengusaha untuk memiliki NPWP dan NPPKP, dan f) Kewajiban menyampaikan SPT.

10.Manfaat perpajakan

10.1. Manfaat Bagi Pemerintah

Menurut mardiasmo (2016) elihat dasar pedoman kegiatan kerja profesi Konsultan Pajak dan dasar pedoman kerja Direktorat Jenderal Pajak adalah sama-sama peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, maka pernah dikatakan bahwa Konsultan Pajak adalah merupakan mitra Direktorat Jenderal Pajak. Istilah mitra ini juga tercantum dalamMukadimah Anggaran Dasar Ikatan Konsultan Pajak Indonesia. Istilah mitra di sini bukanlah berarti bahwa Konsultan Pajak adalah pegawai pajak yang tidak dibayar pemerintah dan merupakan perpanjangan tangan dari Direktorat Jenderal Pajak yang harus mengekor saja, tetapi mitra dalam arti memiliki kemandirian atau independensi. Mitra di sini hendaknya diartikan bahwa antara Konsultan Pajak dan Direktorat Jenderal Pajak mempunyai pedoman kerja yang sama. Selain itu, dalam pelaksanaan sistem *self assessment* dewasa ini kedua pihak di atas juga harus menyebarluaskan dan memasyarakatkan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga masyarakat Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya serta menuntut hak perpajakannya dapat sesuai

dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Selain itu, manfaat lain adanya profesi Konsultan Pajak bagi pemerintah antara lain:

- a. Konsultan harus ikut menyadarkan Wajib Pajak agar patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya yang merupakan kewajiban pengabdian kepada negara dalam ikut menjamin kelangsungan pembangunan nasional. Hal ini sangat berkaitan erat dengan anggapan masyarakat Wajib Pajak bahwa kewajiban pembayaran pajak adalah merupakan suatu beban pengeluaran yang bagaimanapun juga harus selalu diupayakan penghematan.
- b. Konsultan Pajak juga ikut mengusahakan terciptanya iklim perpajakan nasional yang lebih sehat dengan melakukan kontrol sosial yaitu meneliti apakah aparat pajak dalam menuntut hak penerimaan negara dari sektor pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- c. Konsultan Pajak diharapkan dapat ikut meningkatkan kualitas mutu pelayanan perpajakan kepada masyarakat Wajib Pajak.

10.2. Manfaat Bagi Wajib Pajak

Sekarang ini pelaksanaan sistem perpajakan di Indonesia adalah dengan menerapkan sistem *self assessment*, di mana kepada Wajib Pajak diberikan kepercayaan yang lebih besar untuk menghitung dan melaporkan sendiri pajaknya. Dalam melaksanakan sistem *self assessment* tersebut dituntut adanya pemahaman dan penguasaan dari segenap lapisan masyarakat Wajib Pajak mengenai materi ketentuan perundang-undangan perpajakan, baik mengenai hak-hak Wajib Pajak maupun kewajibannya sebagai Wajib Pajak. Selain itu kepastian hukum bagi Wajib Pajak harus dijamin yang artinya *law enforcement*. Undang-Undang Perpajakan harus benar-benar dilaksanakan dengan konsekuen, yaitu baik aparat pajak maupun Wajib Pajak harus samasama mematuhi ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Apabila dilihat dari jasa yang diberikan oleh Konsultan Pajak seperti yang disebutkan di atas, maka manfaat atau peranan Konsultan Pajak bagi Wajib Pajak adalah berkaitan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan dari Wajib Pajak, yang antara lain:

- a. Memberikan jasa *tax compliance* audit.
- b. Membantu Wajib Pajak dalam membuat perhitungan pajaknya yang harus dibayar dan sekaligus memberikan pengarahan dalam pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) sebagai laporan tahunannya yang harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

c. Memberikan konsultasi dalam masalah perpajakan yang dihadapi

11.Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) ada beberapa kriteria yang dipergunakan untuk mendefinisikan pengertian dan kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Kriteria kelompok usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki hasil penjualan tahunan Rp 300.000.000,00 dan memiliki kekayaan bersih (tidak termasuk tanah/bangunan) paling banyak Rp 50.000.000,00. Kriteria usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memiliki hasil penjualan antara Rp 300.000.000,00 sampai dengan Rp 2.500.000.000,00 dan memiliki kekayaan bersih antara Rp 50.000.000,00 sampai dengan Rp 500.000.000,00. Kriteria usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan dengan penjualan tahunan mencapai Rp 2.500.000.000,00 sampai dengan Rp 50.000.000.000 dan memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp 500.000.000,00.

Usaha mikro

Menurut Mufti Rahmatika (2010) Pengertian usaha mikro dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM Pasal 1 angka1 yang dimaksud dengan usaha mikro adalah usaha produktif milik orang atau perseorangan dan/atau badan usaha perseorangan yang mempunyai kriteria sebagai berikut: memiliki kekayaan paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Ciri-ciri usaha mikro:

a. Jenis barang/komoditi usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu

dapat berganti;

b. Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat pindah tempat;

- c. Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun, dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha;
- d. Sumber daya manusianya (pengusahanya) belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai;
- e. Tingkat pendidikan rata-rata relatif sangat rendah;
- f. Umumnya belum akses kepada perbankan, namun sebagian dari mereka sudah akses ke lembaga keuangan non bank;
- g. Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.

Usaha kecil

Menurut Mufti Rahmatika (2010). Sedangkan kriteria usaha kecil adalah sebagai berikut: usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha kecil yang memenuhi kriteria sebagai berikut: memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Atau memiliki penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah). Ciri-ciri usaha kecil:

- a. Jenis barang/komoditi yang diusahakan umumnya sudah tetap tidak gampang berubah;
- b. Lokasi/tempat usaha umumnya sudah menetap tidak berpindah-pindah;
- c. Pada umumnya sudah melakukan administrasi keuangan walau masih sederhana, keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dengan keuangan keluarga, sudah membuat neraca usaha;
- d. Sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP;
- e. Sumber daya manusia (pengusaha) memiliki pengalaman dalam berwira usaha;
- f. Sebagian sudah akses ke perbankan dalam hal keperluan modal;
- g. Sebagian besar belum dapat membuat manajemen usaha dengan baik seperti *business planning*

Usaha menengah

Menurut Mufti Rahmatika (2010). Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dan kriteria usaha menengah adalah sebagai berikut: memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah). Ciri-ciri usaha menengah:

- a. Pada umumnya telah memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik, lebih teratur bahkan lebih modern, dengan pembagian tugas yang jelas antara lain, bagian keuangan, bagian pemasaran dan bagian produksi;
- b. Telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi dengan teratur, sehingga memudahkan untuk auditing dan penilaian atau pemeriksaan termasuk oleh perbankan;
- c. Telah melakukan aturan atau pengelolaan dan organisasi perburuhan, telah ada Jamsostek, pemeliharaan kesehatan dll;
- e. Sudah memiliki segala persyaratan legalitas antara lain izin tetangga, izin usaha, izin tempat, NPWP, upaya pengelolaan lingkungan dll;
- f. Sudah akses kepada sumber-sumber pendanaan perbankan;
- g. Pada umumnya telah memiliki sumber daya manusia yang terlatih dan terdidik

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengkaji pelaksanaan sosialisasi perpajakan di desa Ketanon untuk meningkatkan kesadaran pengusaha dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan . Dengan demikian, penelitian ini hanya mengkaji satu variabel atau variabel tunggal yaitu pelaksanaan sosialisasi perpajakan untuk meningkatkan kesadaran pengusaha dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan desa Ketanon.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dimana penulis memberikan gambaran tentang upaya sosialisasi perpajakan untuk meningkatkan kesadaran pengusaha dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan serta kendala-kendala yang dialami dalam penyampaian Pajak Bumi dan Bangunan kepada pengusaha di desa Ketanon..

Informan dalam penelitian ini adalah beberapa pengusaha dan BAPENDA yang dipandang dapat memberikan informasi berkenaan dengan masalah yang diteliti. Teknik Pengumpulan Data dilakukandengan cara:

- a) Observasi yang digunakan sebagai teknik pertama dilakukan untuk mengamati secara langsung di lapangan yaitu usaha yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Tulungagung untuk meningkatkan kesadaran pengusaha dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
- b) Dokumentasi, cara pengumpulan data dengan cara membaca, mempelajari, mengutip, dan merangkum data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
- c) Wawancara yaituPengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab dengan pihak yang dianggap kompeten dengan masalah yang diteliti mengenai pelaksanaan sosialisasi dan kendala yang dihadapi dalam mensosialisasikan kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan bagi pengusaha di Desa Ketanon.

Analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis deskriptif dengan menggambarkan kenyataan atau keadaan-keadaan atas suatu objek dalam bentuk uraian kalimat berdasarkan keterangan-keterangan dari pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan penelitian ini

BAB III

PEMBAHASAN

Upaya Badan Pendapatan Daerah dalam Sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan

Bapenda selaku badan yang bertugas mengurus pajak bumi dan bangunan (PBB) melakukan berbagai cara. sosialisasi merupakan salah kegiatan yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah. Pembinaan masyarakat dapat dilakukan melalui berbagai upaya, antara lain pemberian penyuluhan pengetahuan perpajakan baik melalui media massa maupun penerapan langsung kepada masyarakat. Fakta yang dapat dilihat BAPENDA bekerja sama dengan Pemerintah desa telah melakukan upaya sosialisasi perpajakan di balai desa. Selain itu mereka juga bekerja sama dengan beberapa pihak untuk dapat melakukan sosialisasi baik melalui media elektronik maupun media cetak.

Demi meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan masyarakat, diperlukan sumber-sumber pendapatan daerah. Salah satunya melalui pungutan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan (PBB-P2). Untuk itu, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Tulungagung menggelar sosialisasi penyampaian SPPT dan pemungutan PBB-P2 tahun 2020. Bertempat di Crown Victoria Hotel, acara dihadiri seluruh kasi pemerintahan (kasipem) kecamatan, kepala desa (kades), lurah, serta koordinator penyampaian PBB-P2 dan BPHTB se-Kabupaten Tulungagung.

Plt Kepala Bapenda Tulungagung Sugiono, melalui Kabid Pendataan dan Penetapan Tumijan mengatakan, sosialisasi ini sangat penting. Mengingat untuk memenuhi target PBB-P2, diperlukan dukungan dari para pemangku kebijakan. Baik di tingkat kecamatan maupun desa. "Tahun 2020 ini ditetapkan PBB-P2 sebesar Rp 29,3 miliar dan jumlah wajib pajak sebanyak 652.625 lembar SPPT. Nah, target kami harus tercapai di atas 90 persen. Untuk itu, perlu dukungan berbagai pihak," jelasnya. (radar tulungagung)

Kedua, Web Site. Bapenda Tulungagung menggunakan berita online dalam memberikan informasi kepada masyarakat, web yang sering meliput kegiatan perpajakan yang dilakukan oleh Bapenda Tulungagung di bapenda.tulungagung.go.id. di web site tersebut dimuat tata cara membayar pajak dan informasi terbaru terkait pajak.

peningkatan jumlah wajib pajak tiap tahunnya meningkat khususnya di desa Ketanon tetapi jumlah orang yang membayar masih sedikit bahkan semakin tahun semakin merosot. Dengan adanya ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat masih rendah.

Kendala yang Dihadapi BAPENDA dalam Sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan

secara keseluruhan kegiatan sosialisasi yang dilakukan terus bertambah tetapi jumlah pembayar pajak masih sangatlah sedikit khususnya di desa Ketanon masih banyak sekali pengusaha yang belum membayar pajak PBB. Kendala yang dihadapi dalam melakukan sosialisasi PBB itu terdiri atas dua kendala, kendala yang dialami sebelum dan sesudah dilaksanakan sosialisasi kendala dari masyarakat itu sendiri. Dalam melaksanakan penyuluhan, terutama penyuluhan di desa karena kurangnya minat masyarakat untuk menghadiri penyuluhan tersebut, Meski sudah ada himbauan dan pengumuman tetap saja sedikit yang datang. salah satu penyebab kenapa masyarakat jarang yang datang karena memang pelaksanaan hanya sekali dan itu pun dengan waktu yang terbatas

Dari penelitian diatas peneliti menyimpulkan ada beberapa faktor penyebab turunnya kesadaran masyarakat. Data ini didapatkan setelah mewawancarai pengusaha di bidang pakaian, kuliner, dan teknologi. Faktor ini dapat menurunkan tingkat kesadaran dan kepedulian sukarela Wajib Pajak. Antara lain:

- 1) Prasangka negatif kepada aparat perpajakan harus digantikan dengan prasangka positif. Sebab, prasangka negatif ini akan menyebabkan para wajib pajak bersikap defensif dan tertutup. Mereka akan cenderung menahan informasi dan tidak kooperatif. Mereka akan berusaha memperkecil nilai pajak yang dikenakan pada mereka dengan memberikan informasi sesedikit mungkin. Perlu usaha keras dari lembaga perpajakan dan media massa untuk membantu menghilangkan prasangka negatif tersebut.
- 2) Hambatan atau kurangnya intensitas kerjasama dengan Instansi lain (pihak ketiga) guna mendapatkan data mengenai potensi Wajib Pajak baru, terutama dengan instansi daerah atau bukan instansi vertikal.
- 3) Bagi Calon Wajib Pajak, Sistem Self Assessment dianggap menguntungkan, sehingga sebagian besar mereka enggan untuk mendaftarkan dirinya bahkan menghindari kewajiban ber-NPWP. Data-data tentang dirinya selalu diupayakan untuk ditutupi sehingga tidak tersentuh oleh DJP.

- 4) Masih sedikitnya informasi yang semestinya disebarkan dan dapat diterima masyarakat mengenai peranan pajak sebagai sumber penerimaan negara dan segi-segi positif lainnya.
- 5) Adanya anggapan masyarakat bahwa timbal balik (kontra prestasi) pajak tidak bisa dinikmati secara langsung, bahkan wujud pembangunan sarana prasana belum merata, meluas, apalagi menyentuh pelosok tanah air.
- 6) Adanya anggapan masyarakat bahwa tidak ada keterbukaan pemerintah terhadap penggunaan uang pajak.

. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat

ditarik kesimpulan sebagai berikut: Upaya yang dilakukan BAPENDA Tulungagung dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan menggunakan sosialisasi secara langsung dan web site atau media online masih belum cukup untuk meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya desa Ketanon. Hal ini disebabkan karena masih terbatasnya agenda yang dilakukan BAPENDA dan ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah.

Saran

1. Untuk pemerintah daerah harus lebih berusaha keras untuk menyampaikan informasi terkait pajak bumi dan bangunan, mungkin dengan melakukan kegiatan lain yang dapat menarik minat masyarakat. Kemudian BAPENDA sebagai badan yang ditunjuk harus lebih transparan lagi agar dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat
2. Pengusaha harus lebih aktif lagi dalam mempelajari dan memahami tentang pajak daerah. Mereka harus berinisiatif sendiri, karena dengan tertib membayar pajak mereka dapat membantu pertumbuhan ekonomi daerah dimana nantinya para pengusaha tersebut bisa merasakan manfaatnya.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal :

Indonesia, Presiden Republik. 2009. “Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.” *Bifurcations*.

Prabowo, Rachmad Gesah Mukti. 2014. “ANALISIS PEMENUHAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN UNTUK MENINGKATKAN PENERIMAAN SEKTOR PAJAK” 1 (1): 103–20.

Pranadata, I Gede Putu. 2014. “PENGARUH PEMAHAMAN WAJIB PAJAK, KUALITAS PELAYANAN PERPAJAKAN, DAN PELAKSANAAN SANKSI PAJAK, TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KPP PRATAMA BATU.” *Skripsi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya*.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2008. 2008. “Tentang: Usaha, Mikro, Kecil Dan Menengah.” *Sekretariat Negara. Jakarta*.

Website :

<https://www.pajak.go.id/id/artikel/membangun-kesadaran-dan-kepedulian-sukarela-wajib-pajak>